

### **Kakorlantas Polri Imbau Masyarakat Segera Jadi Peserta JKN**

Purwakarta (31/08/2022) – Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas POLRI) bersama BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja meninjau Polres Purwakarta untuk melihat progres kesiapan rencana uji coba pemberlakuan kepesertaan JKN aktif sebagai salah satu persyaratan pengurusan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kepala Korlantas POLRI, Irjen Firman Santyabudi mengatakan bahwa diperlukan uji coba terlebih dulu untuk memastikan rencana penerapan aturan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM dan STNK. Penerapannya pun direncanakan tidak serta merta, melainkan secara bertahap.

“Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 mengenai kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan, kami tengah mengembangkan sarana prasarannya. Hari ini kita melihat hubungan antarsistem dan data yang kita kerjakan bersama-sama dengan BPJS Kesehatan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, aktifkan segera BPJS Kesehatan Anda agar bisa dilayani lebih cepat di sentra-sentra pelayanan publik, termasuk layanan SIM dan STNK di kepolisian,” kata Firman.

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengapresiasi Korlantas POLRI yang akan memberlakukan regulasi untuk memastikan pemohon SIM dan STNK adalah peserta JKN aktif. Menurut Mundiharno, langkah tersebut sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Apalagi, sudah banyak regulasi yang menegaskan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta Program JKN, mulai dari UU SJSN Tahun 2004, UU BPJS Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan perubahan keduanya yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Inpres Nomor 8 Tahun 2017, hingga Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

“Persyaratan kepesertaan JKN aktif ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memastikan semua penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali. Dengan adanya integrasi sistem BPJS Kesehatan dan Korlantas, diharapkan masyarakat yang sudah menjadi peserta JKN bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan publik, termasuk saat membuat ataupun memperpanjang masa berlaku SIM dan STNK. Semoga uji coba ini bisa dilanjutkan ke berbagai tempat,” kata Mundiharno.

Mundiharno mengungkapkan, sepanjang hampir sembilan tahun berjalan, dampak positif kehadiran Program JKN begitu terasa. Ada puluhan juta masyarakat yang telah merasakan manfaat program ini, bahkan ada jutaan orang yang terselamatkan dari jurang kemiskinan akibat pengeluaran biaya kesehatan. Sedemikian pentingnya jaminan kesehatan hingga Pemerintah melalui Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) menargetkan 98% penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN pada tahun 2024.

“Program JKN adalah milik bersama, dari kita untuk kita. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, pemerintah, atau peserta yang sakit saja, agar Program JKN bisa terus berjalan memberikan manfaat kepada yang membutuhkan,” tegasnya.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut hubungi:

**Humas BPJS Kesehatan**

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Care Center : 165

[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

**PRESS RELEASE****Police Headquarters Calls on the Community to Immediately Become JKN Participants**

Purwakarta (31/08/2022) – The Traffic Corps of the National Police of the Republic of Indonesia (Korlantas POLRI) together with BPJS Kesehatan and Jasa Raharja reviewed the Purwakarta Police to see the progress of the trial plan for the implementation of active JKN membership as one of the requirements for administering a Driver's License service (SIM) and Vehicle Number Certificate (STNK).

The head of the POLRI Korlantas, Inspector General Firman Santyabudi, said that a trial was needed to ensure that the plan to implement the regulation did not become an obstacle for people who wanted to take care of making or extending their SIM and STNK. Its implementation is planned not immediately, but gradually.

"Following the Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2022 regarding the community's obligation to become active participants of BPJS Kesehatan, we are currently developing the infrastructure. Today we look at the connection between systems and data that we are working on together with BPJS Kesehatan. We also urge the public to immediately activate their BPJS Kesehatan membership so that they can be served faster at public service centers, including SIM and STNK services at the police," said Firman.

Meanwhile, BPJS Kesehatan's Director of Supervision, Inspections and Inter-institution Relations Mundiharno appreciated the POLRI Korlantas who will implement the regulation that ensure SIM and STNK applicants are active JKN participants. According to Mundiharno, it's in line with Presidential Instruction No. 1 of 2022. Moreover, there are many regulations that state that every Indonesian citizen must be a participant in the JKN Program, starting from the 2004 National Social Security Law, 2011 BPJS Law, Government Regulation No. 86 of 2013, Presidential Regulation No. Number 82 of 2018 and the second amendment, namely Presidential Decree Number 64 of 2020, Presidential Instruction Number 8 of 2017, to Presidential Instruction Number 1 of 2022.

"The requirement for active JKN participation is not to make it difficult for the community, but to ensure that all Indonesians are protected by health insurance. With the integration of the BPJS Kesehatan and Korlantas systems, it is hoped that people who have become JKN participants can more easily get public services, including when making or extending the validity period of SIM and STNK. Hopefully this trial can be continued in various places, "said Mundiharno.

Mundiharno said that for almost nine years, the presence of JKN program makes a lot of positive impact. There are tens of millions of people who have felt the benefits of this program. There are even millions of people who have been saved from poverty due to expensive health costs. The importance of health insurance make the Government set the target that by 2024, JKN Program membership covers 98% of Indonesia's population through the National Long-Term Development Plan (RPJMN).

"JKN program is a shared property, from us to us. Therefore, participation from all parties is needed, not only from BPJS Kesehatan, the government, or participants who are sick, so that the JKN Program can continue to provide benefits to those in need," he said.